

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peningkatan dan transparansi serta akuntabilitas pada organisasi laba maupun organisasi nirlaba membutuhkan perhatian maupun anggota organisasi tersebut. Karakteristik organisasi yang berorientasi laba berbeda dengan organisasi nirlaba. Perbedaan yang paling utama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Organisasi nirlaba memperoleh dana dari para anggota maupun dari penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari organisasi nirlaba adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya. Dimana pemberi dana tidak berkehendak untuk meminta pengembalian, bunga, ataupun memiliki organisasi. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan.

Organisasi nirlaba yang dimaksudkan disini adalah Organisasi nirlaba atau non-laba atau non-pemerintahan meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan (misalnya: Gereja dan Masjid), organisasi politik dan lain sebagainya. Organisasi publik non-pemerintahan ini mengikuti Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK nomor 45 untuk menjadi acuan dalam menyusun pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi dengan adanya standar yang berlaku umum. Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK nomor 45, bisa membuat penyajian laporan keuangan di organisasi nirlaba menjadi seragam dalam pembuatannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, seperti Gereja meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*, atau sering disebut per tanggal tertentu. Tujuan pembuatan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dari peristiwa lainnya yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,

hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yaitu: laporan dari aktivitas pendanaan seperti penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang; penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaan dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap; bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Dan laporan tentang pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir untuk memberikan penjelasan informasi kepada pembaca laporan keuangan dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan tambahan mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK nomor 45 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan bagi para penggunanya, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur atau penyumbang. Namun, pada kenyataannya masih banyak organisasi nirlaba (dalam hal ini Gereja) yang masih belum menggunakan pedoman atau acuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Nomor 45. Laporan keuangan yang dipakai gereja masih sangat sederhana, dimana organisasi tersebut tidak membuat laporan keuangan yang lengkap yang seharusnya digunakan pada organisasi sektor publik pada umumnya yang telah menerapkan pedoman PSAK nomor 45.

Gereja Niha Keriso Protestan–Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger adalah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pelayanan rohani atau keagamaan kepada masyarakat. Gereja Niha Keriso Protestan–Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger adalah suatu organisasi nirlaba. Informasi keuangan yang dihasilkan selain untuk pihak manajemen Gereja (Badan Pekerja Harian Jemaat), juga untuk masyarakat atau jemaat gereja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumbangan yang mereka berikan telah digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan jemaat. Informasi keuangan tersebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Allah atas pengelolaan kekayaan dan kepemimpinan yang dimiliki oleh Gereja untuk pekerjaan mulia dalam membimbing para pelayan gereja dan warga jemaatnya bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih.

Penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Gereja Niha Keriso Protestan–Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger sangatlah sederhana, yaitu berupa format yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang direkap bulanan dan tahunan. Sedangkan menurut PSAK nomor 45 laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Begitu juga penerimaan sumbangan baik persembahan kolekte, iuran, hasil lelang, sumbangan berupa aktiva tetap dari jemaat maupun non-jemaat yang diterima oleh gereja ini tidak begitu jelas apakah sumbangan-sumbangan tersebut terikat atau tidak terikat, apalagi nilai sumbangan dan aktiva yang dimiliki oleh gereja ini besar nilainya. Sehingga tidak menggambarkan secara jelas pengelolaan keuangan di Gereja Niha Keriso Protestan–Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger. Oleh karena itu, laporan keuangan Gereja haruslah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barbara Amelia Kristy (2017) dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45”. Hasil penelitian adalah pada Yayasan Bina Bhakti, ditemukan bahwa dalam laporannya masih sangat sederhana yakni berupa pendapatan dan pengeluaran saja.

Begitu pula dalam penelitian Himawan Prptomomo (2015) dengan judul “Rekonstruksi Laporan Keuangan Gereja Kristen Jawi Weta Gresik Berdasarkan

PSAK No.45”. Hasil penelitian yang dilakukan di Gereja Kristen Jawi Wetan Gresik adalah ditemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kebijakan Majelis Agung gereja yang berformat AB. Yakni berisi laporan pendapatan dan pengeluaran saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Sofyana Putri (2014) dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Gereja Huria Kristen Batak (HKBP) Kertanegara Semarang”. Hasil penelitian adalah mengungkapkan hal yang sama bahwa laporan keuangan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kertanegara Semarang belum menerapkan PSAK Nomor 45 dan berpedoman pada Tata Dasar serta Peraturan Gereja.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dengan judul : **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 pada Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger Distrik III Kota Gunungsitoli”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan masalah yang ada adalah:

- a. Bagaimana penyusunan dan bentuk laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger untuk tahun 2016.

- b. Bagaimana penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang tepat pada laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger untuk tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan dan bentuk laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger untuk tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger yang tepat sesuai dengan PSAK nomor 45.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi penulis, untuk menambah keterampilan dan wawasan serta mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di universitas. Membandingkannya dengan praktik yang sesungguhnya terutama mengenai penerapan PSAK nomor 45 tentang penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba.
- b. Bagi subjek penelitian, dalam hal ini Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger dapat memperoleh

pengetahuan dan masukan mengenai standar laporan keuangan yang berlaku umum yang sesuai dengan PSAK nomor 45, serta cara penerapannya pada laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger.

- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai hubungan sejenis dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Nirlaba

2.1.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan kerja sama dengan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dengan pencapaian tujuan bersama.

Menurut Mulyadi dalam buku Timotius Duha:

“Organisasi pada hakikatnya adalah sekelompok orang yang memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu, atau menyelesaikan tugas tertentu”.¹

Sedangkan menurut Tre Watha dan Newport dalam buku Timotius Duha, **Organisasi adalah sebuah struktur sosial yang didesain guna mengoordinasi kegiatan dua orang atau lebih, melalui suatu pembagian kerja, dan hierarki otoritas, guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu”.**²

2.1.2 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik

¹ Timotius Duha, **Perilaku Organisasi**, Cetakan Kesepuluh: Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hal. 2.

² **Loc.Cit.**

perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45:

“Entitas Nirlaba adalah entitas yang memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan”.³

Sehingga dari defenisi di atas menjelaskan bahwa organisasi nirlaba lebih berfokus terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dan mensejahterakan masyarakat.

Organisasi nirlaba secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi non-laba pemerintahan dan organisasi non-laba non-pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), sedangkan organisasi non-laba non-pemerintahan meliputi gereja, yayasan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi politik, organisasi sukarelawan dan lain sebagainya.

2.1.3 Ciri-ciri Organisasi Nirlaba

Menurut Nordiawan, organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.**
- b. Dimiliki secara kolektif oleh publik.**

³ Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011, hal. 45.1.

- c. **Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.**
- d. **Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.**⁴

Menurut PSAK No. 45, organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. **Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.**
- b. **Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.**
- c. **Tidak ada kepemilikan lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.**⁵

2.2 Gereja

2.2.1 Pengertian Gereja

Kata “Gereja” berasal dari bahasa Portugis: *igreja*, yang berasal dari bahasa Yunani: *ekklêsia* yang berarti dipanggil keluar (*ek* = keluar; *klesia* dari kata *kaleo* = memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari dunia memiliki beberapa arti:

- a. Arti pertama adalah ‘umat’, atau lebih tepat ‘persekutuan’ orang kristen.

Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung.

⁴ Deddi Nordiawan, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 2.

⁵ **Op.Cit.**, Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011, hal. 45.2.

- b. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat rekreasi.
- c. Arti ketiga adalah mazhab (aliran) atau denominasi dalam agama Kristen. Gereja katolik, Gereja protestan, dan lain-lain.
- d. Arti keempat adalah lembaga (administratif) daripada sebuah mazhab Kristen.
- e. Arti terakhir dan juga arti umum adalah sebuah “rumah ibadah” umat kristen, dimana umat bisa berdoa atau bersembahyang.

Gereja (untuk arti yang pertama) terbentuk 50 (Lima Puluh) hari setelah kebangkitan Yesus Kristus pada hari raya Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus yang dijanjikan Allah diberikan kepada semua orang yang percaya pada Yesus Kristus.

Dalam Pokok-pokok Pengajaran Agama Kristen, kata “Gereja” berasal dari Kitab Perjanjian Baru, khususnya Matius 16:18 dan Efesus 1:22, mempergunakan kata “*ekklesia*” untuk istilah gereja. Sedangkan Kitab Perjanjian Lama menggunakan kata “*kahaal*”. Pada zaman Purba orang-orang Timur Dekat menggunakan istilah *ekklesia* untuk menggambarkan suatu perkumpulan warga masyarakat secara umum. Persekutuan ini kadang-kadang untuk suatu kerumunan massa yang terjadi akibat suatu peristiwa (Kisah Para Rasul 19:32, 39 dan 40).

Pemahaman *ekklesia* sebagai suatu persekutuan masyarakat umum yang biasa ini pada kemudian hari berkembang menjadi suatu bentuk persekutuan yang

khusus bagi jemaat atau umat Allah. Hal ini terjadi pada saat berkumpul bersama untuk suatu seremoni ataupun perayaan dalam rangka beribadat kepada Tuhan. Dengan dasar ini, sampai saat ini kata ekklesia atau gereja dipahami sebagai suatu bentuk persekutuan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah menjadi suci kembali di hadapan Allah oleh karena penebusan Tuhan Yesus Kristus.

Di zaman Perjanjian Baru orang-orang Yahudi lebih suka menggunakan kata “*synagoge*” untuk menyebut rumah ibadat dan persekutuan mereka di dalam rumah ibadat tersebut. Dan untuk membedakan mereka dari orang non-Yahudi dan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang sejati, baik Yesus maupun orang Kristen mula-mula menggunakan kata *ekklesia* untuk persekutuan mereka.

Ekklesia dan *kahaal* memberi isyarat bahwa gereja merupakan suatu persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dan dipersekutukan oleh Allah. Persekutuan ini memang kelihatannya sama sekali tidak berbeda dengan persekutuan-persekutuan masyarakat lainnya. Namun, gereja dalam arti *ekklesia* dan *kahaal* mempunyai suatu pengakuan bahwa persekutuan mereka bukan didorong oleh adanya kepentingan atau tujuan yang sama untuk bersekutu. Tetapi mereka berkumpul karena mereka telah dipanggil Allah untuk bersekutu dengan-Nya.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis gereja yang tergabung dalam organisasi/komunitas Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) antara lain: Huria Kristen Batak Indonesia (HKBP), Banua Niha Keriso Protestan Indonesia

(BNKP), Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKPI), Gereja Toraja, Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK), Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP), Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII), dan sebagainya.

2.2.2 Gereja sebagai Organisasi Keagamaan dan Nirlaba

Menurut Indra Bastian Secara etimologis, organisasi keagamaan adalah: **“Dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. Organisasi keagamaan dalam hal ini mengacu pada Masjid, Gereja, Kapel, Kuil, Klenteng, Wihara, maupun Pura ataupun di luar bidang lainnya yang bergerak dalam organisasi keagamaan”.**⁶

Dari segi penyelenggaraannya, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi dalam agama tersebut. Banyak yang memberikan pertanyaan benarkah ilmu akuntansi ada dalam agama dalam hal ini baik agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Islam, karena sebagaimana dipahami oleh banyak orang dan kalangan agama hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas. Dan prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi (Standar Akuntansi Keuangan), tidak masuk dalam cakupan agama.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam tatanan makro maupun mikro. Ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam

⁶ Indra Bastian, **Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 216.

segala aspek kehidupan. Di dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit atau Tuhan” perlu penerjemahan dan penafsiran sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial ekonomi umat.

Eksistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual-beli, hutang-piutang, pembayaran pajak, pemberian persembahan dan sewa-menyewa. Seperti halnya dalam Kitab suci agama Kristen:

1. Maleakhi 3:10 tentang persembahan ke dalam rumah Tuhan,

“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di Rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan”.⁷

2. Imamat 25:14 tentang kegiatan jual-beli, **“Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain”.⁸**

3. Matius 18:24-27 tentang hutang-piutang,

“Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan

⁷ Lembaga Alkitab Indonesia, **Alkitab**: Cetakan Ketujuhpuhdelapan, Edisi NLO, Jakarta, 2008, hal. 1.027.

⁸ **Ibid**, hal. 138.

hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya”.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama, sistem pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban (pembuatan laporan keuangan).

Menurut Indra Bastian:

“Menilik secara jelas apa yang timbul pada organisasi keagamaan, organisasi lembaga peribadatan dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba. Hal ini disebabkan oleh gerak dan orientasi pada organisasi keagamaan seirama dengan organisasi yang berjenis nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah sumbangan dana yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikannya”.¹⁰

Tujuan organisasi keagamaan atau gereja adalah memberikan pelayanan kepada umat atau pengikut agamanya dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Sama halnya dengan gereja yang menjalankan Tri tugas panggilan gereja yaitu Bersaksi (Marturia), Bersekutu (Koinonia) dan Melayani (Diakonia).

Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada umat/jemaat, namun tidak berarti gereja sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Misalnya, apabila terjadi perkembangan jemaat gereja secara kuantitas,

⁹ *Ibid*, hal. 23-24.

¹⁰ *Op.Cit*, Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, hal. 216.

maka kebutuhan akan daya dukung untuk pelayanan tersebut otomatis turut berkembang. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi berkembangnya pelayanan.

Menurut Indra Bastian:

“Dari segi sumber pendanaan atau lebih konkretnya struktur modal dan struktur pembiayaan, organisasi keagamaan sangat berbeda dalam hal bentuk dan jenisnya. Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai suatu umat satu agama”.¹¹

Dalam gereja sumber pendanaannya berbeda dari perusahaan pada umumnya yang bersifat *profit oriented*. Dimana sumber pendanaan gereja utamanya berasal dari jemaat dan non-jemaat yang sifatnya wajib atau sukarela. Karena dalam konteks kepercayaan agama kristen, dana (persembahan atau sumbangan) yang di berikan oleh jemaat kepada gereja adalah:

- a. Perintah Allah sendiri atau kewajiban jemaat (Maleakhi 3:10:

“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di Rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan”.¹²

- b. Secara sukarela atau bukan dengan sedih hati atau keterpaksaan (2 Korintus 9:7 : **“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”.**¹³

¹¹ **Ibid**, hal. 217.

¹² **Op.Cit.**, Lembaga Alkitab Indonesia, **Alkitab**, hal. 1.027.

¹³ **Ibid**, hal. 222.

- c. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur, sukacita, dan kasih kepada Allah (2

Korintus 9:11-12 :

“kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah”.¹⁴

Matius 22:37 : **“Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu”.**¹⁵

- d. Sebagai bukti iman atau kepercayaan yang nyata kepada Allah (Amsal 3:9

: “Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu”.¹⁶

- e. Untuk perluasan misi pelayanan pelayan-pelayan Tuhan (1 Korintus 16:1-2 :

”Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada Jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai – dengan apa yang kamu peroleh – menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang”.¹⁷

Berbeda dengan perusahaan yang sumber pendanaannya bukan dalam konteks kepercayaan keagamaan atau kerohanian, melainkan sumber pendanaan perusahaan dapat bersumber dari pemilik sendiri maupun dari pinjaman dari pihak luar (eksternal), yang dananya dipergunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan dan kemakmuran pemilik perusahaan.

¹⁴ **Ibid**, hal. 222.

¹⁵ **Ibid**, hal. 29.

¹⁶ **Ibid**, hal. 683.

¹⁷ **Ibid**, hal. 214.

Menurut Indra Bastian:

“Adapun dalam konteks pola pertanggungjawaban, jika organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik usaha dan kreditornya, maka pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya dapat berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah”¹⁸.

Pertanggungjawaban pada gereja sebagai bentuk nyata bahwa pengelolaan sumbangan dan dana gereja telah dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan jemaat. Apabila pertanggungjawabannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan harapan jemaat, maka akibatnya adalah berkurangnya kepercayaan jemaat, tidak puas, bahkan dianggap oleh jemaat pengelolaan keuangan telah dikorupsi atau telah melanggar perintah Allah (menimbulkan fitnah).

Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang pertanggungjawabannya kepada pemilik atau investor. Apabila pertanggungjawaban perusahaan (manajemen) tidak memuaskan pemilik atau investor, dapat berakibat berkurangnya investasi pemilik atau bahkan investor tidak mau lagi berinvestasi ke dalam perusahaan.

Menurut Indra Bastian:

“Apabila dilihat dari karakteristiknya, anggaran organisasi keagamaan sangat bersifat terbuka; bahkan umat dapat melihatnya sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini terjadi karena anggaran berasal dari umat dan perkembangan organisasi keagamaan tersebut, pada umumnya, merupakan tanggungjawab umat secara kolektif”¹⁹.

¹⁸ *Op.Cit.*, Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, hal. 217.

¹⁹ *Ibid*, hal. 218.

Anggaran maupun laporan keuangan gereja, sangat terbuka dan dapat dilihat kapan pun oleh seluruh warga jemaat. Sedangkan pada laporan anggaran perusahaan hanya digunakan dan dilihat oleh manajemen dalam perusahaan, tidak disajikan kepada pemilik atau pihak-pihak eksternal lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan. Hanya laporan keuangan perusahaan yang disajikan oleh manajemen kepada pemilik maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.3 Perbedaan Organisasi Laba (Sektor Swasta) dan Organisasi Nirlaba (Sektor publik)

Menurut Nordiawan, secara umum yang membedakan secara signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan adalah:

a. Tujuan Organisasi

Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan.

b. Sumber-sumber Pendanaan

Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan yang bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sedangkan organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Dalam organisasi pemerintahan ini direalisasikan melalui pembayaran pajak dan retribusi, termasuk sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Di organisasi sektor publik lain (non-laba non-pemerintahan), seperti gereja, masjid, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota atau jemaat/jamaah, subsidi atau sumbangan dari donatur.²⁰

Menurut Mardiasmo (2004) dalam buku V. Wiratna Sujarweni, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu:

²⁰ Deddi Nordiawan, **Akuntansi Sektor Publik**: Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 3.

- a. **Tujuan Organisasi**
Untuk sektor swasta adalah mempunyai tujuan utama melakukan usaha untuk mencari laba. Sedangkan sektor publik, penyediaan pelayanan publik seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan lain sebagainya.
- b. **Sumber Pembiayaan**
Sumber pendanaan sektor swasta dari modal pribadi ataupun sekelompok orang. Sedangkan untuk sektor publik pendanaan berasal dari pajak retribusi, pendapatan daerah dan lain sebagainya.
- c. **Pola Pertanggungjawaban**
Pertanggungjawaban sektor swasta kepada pemilik modal, sedangkan sektor publik perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena sumber dana berasal dari masyarakat
- d. **Struktur Organisasi**
Secara struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel, seperti yang dikehendaki oleh manajemen dan pemilik modal. Sedangkan sektor publik mempunyai struktur organisasi yang birokratis.
- e. **Karakteristik Anggaran**
Anggaran pada sektor swasta itu tidak dipublikasikan, sedangkan pada sektor publik wajib untuk dipublikasikan.
- f. **Sistem Akuntansi yang digunakan**
Sistem akuntansi swasta lebih banyak menggunakan basis akrual, sedangkan sektor publik menggunakan basis kas.²¹

2.4 Laporan Keuangan Gereja

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba termasuk gereja. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Gereja memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran atau imbalan apapun dari gereja yang bersangkutan.

²¹ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Sektor Publik**: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 10-11

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba atau gereja timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk gereja, meskipun tidak ada kepemilikan, gereja juga mendanai kebutuhan modalnya dari hutang dan kebutuhan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat, dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan

2.4.1.1 Pengertian Dan Tujuan

Menurut Sofyan Syafri Harahap, Laporan Posisi Keuangan atau neraca adalah **“laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*, atau sering disebut per tanggal tertentu misalnya per tanggal 31 Desember 2005. Posisi yang digambarkan adalah posisi aktiva, kewajiban, dan modal.”**²²

Tujuan Laporan Posisi Keuangan dalam PSAK nomor 45, yaitu “untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain untuk menilai:

²² Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi 2011, Cetakan Keempatbelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 209.

- a. Kemampuan organisasi nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

2.4.1.2 Unsur-unsur Laporan Posisi Keuangan

1. Aktiva

Menurut FASB (1985) dalam buku Sofyan Syafri Harahap:

“Aktiva atau aset didefinisikan sebagai kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu”.²³

Sebagai contoh, organisasi atau gereja biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen seperti: Kas dan setara kas, piutang, persediaan ATK, sewa dan asuransi serta jasa lainnya dibayar dimuka, gedung

²³ **Ibid**, hal. 210.

gereja, tanah, peralatan (seperti: proyektor, alat-alat musik gereja), serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan jasa pelayanan di gereja.

2. Kewajiban

Menurut IAI melalui KDPPLK (1994) dalam buku Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan:

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”.²⁴

Dengan kata lain kewajiban atau hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang dalam bentuk aktiva atau pemberian jasa, yang timbul dari tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.

Kewajiban atau hutang terbagi menjadi: Kewajiban lancar dan Kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban lancar, adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal organisasi. Pos-pos kewajiban lancar yaitu: hutang usaha, utang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar (misalnya: utang gaji pendeta, utang bunga, utang upah koster

²⁴ Adanan Silaban dan Hamongan Siallagan, **Teori Akuntansi**, Edisi Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal. 178.

gereja, utang gaji staf kantor gereja, hutang pada kantor pusat atau sinode), pendapatan diterima di muka (misalnya: sewa diterima di muka atas penyewaan wisma gereja).

- b. Kewajiban Tidak Lancar, adalah kewajiban yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal organisasi. Pos-pos kewajiban tidak lancar yaitu: utang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang dan kewajiban tidak lancar lainnya.

3. Aktiva Netto atau Aktiva Bersih

Menurut PSAK nomor 45:

“Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat”.²⁵

“Sumbangan terikat atau Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau pemberi sumber daya. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer”.²⁶

- a. Aktiva bersih terikat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang atau pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen (bersifat abadi), tetapi organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Misalnya:

²⁵ **Op.Cit.**, Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Revisi 2011, hal.45.7

²⁶ **Ibid**, hal.45.4

aset beasiswa untuk anggota jemaat yang melanjutkan pendidikan teologia.

- b. Aktiva bersih terikat temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang atau pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Misalnya: aset pembangunan gedung gereja, aset untuk dukacita dan kunjungan untuk orang sakit.
- c. Aktiva bersih tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau pemberi sumber daya. Misalnya: Sumbangan spontanitas dari jemaat untuk keperluan operasi gereja, iuran setiap bulan dari jemaat.

Tabel 2.1

ENTITAS NIRLABA		
Laporan Posisi Keuangan		
Per 31 Desember 20X2 dan 20X1		
(dalam Rp juta)		
ASET	20X2	20X1
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	188	1.150
Piutang Bunga	5.325	4.175
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	1.525	2.500
Piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi jangka pendek	3.500	2.500
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti Investasi	13.025	11.400
Aset Tetap	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	545.175	508.750
<i>Jumlah aset</i>	<u>730.550</u>	<u>696.200</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Utang Dagang	6.425	2.625
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan	-	1.625
Utang lain-lain	2.187	3.250
Utang wesel	-	2.850
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
Utang jangka panjang	13.750	16.250
<i>Jumlah liabilitas</i>	<u>26.575</u>	<u>30.850</u>
ASET NETO		
Tidak Terikat	288.070	259.175
Terikat Temporer (Catatan B)	60.855	63.675
Terikat Permanen (Catatan C)	355.050	342.500
<i>Jumlah aset neto</i>	<u>703.975</u>	<u>665.350</u>
<i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i>	<u>730.550</u>	<u>696.200</u>

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011.

2.4.2 Laporan Aktivitas

2.4.2.1 Pengertian dan Tujuan

Menurut PSAK nomor 45:

“Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode”.²⁷

Tujuan utama laporan aktivitas adalah untuk menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto;
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
- d. Dapat membantu para pemberi sumbangan atau sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Serta menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab kinerja manajer.

2.4.2.2 Unsur-unsur Laporan Aktivitas

1. Pendapatan

Menurut Hery, Pendapatan adalah:

“Arus kas masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (kombinasi dari keduanya) dari

²⁷ Op.Cit., Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Revisi 2011, hal. 45.8.

pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi sentral perusahaan”.²⁸

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang atau pemberi sumber daya. Pendapatan gereja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pendapatan Terikat, yaitu: Pendapatan yang diperoleh dari sumbangan atau dari usaha sendiri yang digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan permintaan penyumbang atau pemberi sumber daya. Pendapatan terikat dibagi menjadi 2 (dua).
 - a). Pendapatan Terikat Permanen. Pendapatan yang diperoleh dari penyumbang atau pemberi sumber daya, untuk tujuan tertentu yang tidak dapat berkurang untuk selamanya (bersifat abadi). Misalnya: Sumbangan spontanitas dari jemaat untuk beasiswa pendidikan teologia.
 - b). Pendapatan Terikat Sementara atau Temporer. Pendapatan yang diterima dari sumbangan atau dari usaha sendiri yang digunakan untuk tujuan tertentu, selama batas waktu tertentu atau selama penggunaan (pemanfaatan) dan tersebut telah tercapai. Misalnya: Sumbangan kolekte untuk pembangunan gedung gereja, dana dari penjualan bazaar makanan untuk natal.

²⁸ Hery, **Teori Akuntansi**, Cetakan Pertama: Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 145

- b. Pendapatan tidak Terikat. Pendapatan yang diterima dari sumbangan atau dari usaha sendiri gereja, yang digunakan untuk kegiatan operasi gereja sehari-hari (mingguan) dan bukan untuk tujuan tertentu. Misalnya: Iuran dari jemaat setiap bulan atau setiap tahun, sumbangan spontanitas dari jemaat untuk pendeta yang diserahkan langsung kepada pendeta.

Pos-pos dari pendapatan yaitu:

- a. Sumbangan adalah:

“Disebut juga donasi atau derma, dimana merupakan sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik (berupa uang, makanan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya) oleh perorangan atau badan. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.”²⁹

Sumbangan dalam hal ini menambah pendapatan gereja, sumbangan yang diberikan oleh jemaat maupun non-jemaat dapat bersifat terikat secara permanen, terikat temporer, dan tidak terikat.

Contoh:

- Sumbangan kolekte dari jemaat untuk kegiatan operasi gereja (Tidak Terikat).
- Dana hibah dari pemerintah untuk pembangunan gedung gereja (Terikat Temporer).
- Iuran dari jemaat setiap bulan atau setiap tahun untuk kegiatan gereja (Tidak Terikat).
- Sumbangan spontanitas untuk pembangunan rumah dinas pendeta (Terikat Temporer).

²⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>.

- Sumbangan spontanitas dari jemaat untuk beasiswa pendidikan teologia (Terikat Permanen).
 - Sumbangan bahan-bahan bangunan dari jemaat untuk pembangunan gedung serbaguna gereja (Terikat Temporer).
- b. Jasa Layanan. Kegiatan atau manfaat yang diberikan kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud. Pendapatan gereja juga berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada jemaat. Misalnya: jasa layanan penyelenggaraan pendidikan sekolah sidi, jasa layanan konseling bagi jemaat yang memiliki pergumulan, jasa layanan konseling pra pernikahan.
- c. Penghasilan lainnya atau sumber lainnya. Merupakan penghasilan atau sumbangan yang tidak rutin dan tidak ditentukan jumlahnya, namun diterima dari jemaat dan juga dari non-jemaat (pemerintah maupun lembaga lainnya).

Misalnya: Pendapatan dari penjualan buku-buku rohani untuk kegiatan operasi gereja (Tidak Terikat), pendapatan dari penjualan bazar makanan untuk dana natal (Terikat Temporer), pendapatan bunga dari investasi yang dilakukan gereja untuk operasional gereja (Tidak Terikat), bantuan bahan lelang untuk diakonia (Terikat Temporer).

2. Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya

Menurut PSAK nomor 45:

“Sumbangan atau sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan atau sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi

dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan atau sumber daya tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi”³⁰.

Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya terjadi karena adanya program yang telah diselesaikan (berakhir) dan adanya program yang batas waktu yang ditentukan telah tercapai. Dimana yang awalnya adalah aktiva bersih terikat temporer atau pemanen, terjadi perpindahan menjadi sumber pendapatan tidak terikat atau menambah aktiva bersih tidak terikat dan mengurangi aktiva bersih terikat temporer atau permanen. Misalnya: pemenuhan program natal dan pembangunan rumah dinas pendeta.

3. Beban

Menurut Hery, Beban adalah:

“ arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi sentral perusahaan”³¹.

Laporan aktivitas menyajikan beban sebagai pengurang hanya untuk aset neto tidak terikat. Beban-beban yang terkait dengan gereja, baik beban yang terkait dengan aktiva bersih tidak terikat maupun aktiva bersih terikat, dibebankan seluruhnya sebagai beban aktiva bersih tidak terikat dalam laporan aktivitas.

Beban-beban tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Beban program. Merupakan beban yang terkait secara langsung dengan program gereja yang bersangkutan. Misalnya: Beban program kegiatan

³⁰ **Op.Cit.**, Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011, hal. 45.9.

³¹ **Op.Cit.**, Hery, **Teori Akuntansi**, hal. 145.

natal, yaitu: biaya konsumsi, dekorasi, biaya lilin, biaya pemusik, biaya honor pendeta, biaya percetakan tata tertib acara, biaya bingkisan natal, biaya kegiatan lelang untuk dana natal dan sebagainya.

- b. Beban manajemen dan umum. Merupakan beban yang berkaitan dengan pengelolaan gereja. Misalnya: Biaya gaji karyawan atau staf kantor gereja (tetap), biaya air, listrik, dan telepon setiap bulannya, biaya perjalanan dinas pendeta, biaya konsumsi rapat, biaya penyusutan aktiva tetap gereja.
- c. Beban pencarian dana. Merupakan beban-beban yang terkait dengan pencarian dana. Misalnya: biaya penyusunan proposal, biaya transport pencarian dana, biaya konsumsi pencarian dana, biaya cetak undangan.

4. Kerugian

Menurut Hery, Kerugian adalah:

“penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas oleh transaksi feriferal (transaksi di luar operasi utama perusahaan) atau transaksinya insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang)”.³²

Atau dapat dikatakan bahwa kerugian merupakan beban luar biasa yang jarang terjadi dan relatif besar, serta tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasi gereja. Misalnya: biaya kerugian kebakaran atau bencana alam, biaya tuntutan ganti rugi, ataupun biaya-biaya perkara.

Laporan aktivitas menyajikan kerugian yang diakui pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

³² **Ibid**, hal. 146.

Tabel 2.2

ENTITAS NIRLABA Laporan Aktivitas Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2 (dalam Rp juta)				
	<u>Tidak Terikat</u>	<u>Terikat Temporer</u>	<u>Terikat Permanen</u>	<u>Jumlah</u>
PENDAPATAN				
Sumbangan	21.600	20.275	700	42.575
Jasa Layanan	13.5			13.5
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	14	6.45	300	20.75
Penghasilan investasi lain (catatan E)	2.125			2.125
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (catatan E)	20.57	7.38	11.55	39.5
Lain-lain	375			
ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATAANNYA (CATATAN D)				
Pemenuhan program pembatasan	29.975	-29.975		
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan Berakhirnya pembatasan waktu	3.75	-3.75		
	3.125	-3.125		
<i>Jumlah Pendapatan</i>	<i>109.02</i>	<i>-2.745</i>	<i>12.55</i>	<i>118.45</i>
BEBAN				
Program A	32.75			
Program B	21.35			21.35
Program C	14.4			14.4
Manajemen dan umum	6.05			6.05
Pencarian dana	5.375			5.375
Jumlah Beban (catatan F)	79.925			79.925
Kerugian akibat kebakaran	200			200
Kerugian aktuarial dan kewajiban tahunan		75		75
<i>Jumlah Beban</i>	<i>80.125</i>	<i>75</i>		<i>80.2</i>
PERUBAHAN ASET NETO	28.895	-2.82	12.55	38.625
ASET NETO AWAL TAHUN	259.175	63.675	342.5	665.35
ASET NETO AKHIR TAHUN	288.070	60.855	355.050	703.975

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011.

2.4.3 Laporan Arus Kas

2.4.3.1 Pengertian dan Tujuan

Menurut Indra Bastian, “Laporan arus kas adalah “laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari tiga sisi, yakni dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi”.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dengan melihat laporan arus kas ini dapat diketahui asal sumber pendanaan suatu organisasi dan untuk apa saja sumber dana tersebut digunakan dalam kegiatan operasional.

2.5.3.2 Unsur-unsur Laporan Arus Kas

1. Aktivitas Operasi

Menurut Sofyan Syafri:

“kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan atau tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan”.³³

Contoh arus Kas Masuk dari kegiatan aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

³³ **Op.Cit.**, Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi 2011, hal. 260.

- a. Penerimaan kas dari jemaat maupun non-jemaat. Misalnya: Sumbangan kolekte dari jemaat untuk keperluan operasi gereja.
- b. Penerimaan pendapatan bunga, dividen. Misalnya: Pendapatan bunga atas rekening giro gereja di bank.

Contoh arus Kas Keluar dari kegiatan aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran untuk membayar gaji atau honor pendeta, staf kantor gereja, koster gereja, biaya listrik, air dan telepon gereja.
- b. Pembayaran untuk pembelian alat tulis kantor gereja.
- c. Pembayaran kas sumbangan jemaat kepada kantor pusat atau sinode.

2. Aktivitas Pendanaan

Kegiatan yang termasuk aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal atau aktiva bersih dan pinjaman jangka panjang organisasi, berupa mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari dana tersebut, meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu.

Contoh arus kas masuk dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan kas pinjaman dari jemaat untuk membangun rumah dinas pendeta.

2. Penerimaan kas pinjaman dari bank untuk membangun renovasi gedung gereja.
3. Penerimaan kas dari obligasi, wesel, dan pinjaman jangka panjang lainnya.
4. Penerimaan kas dari non-jemaat (pemerintah) untuk beasiswa pendidikan.

Contoh arus kas keluar dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran kembali utang yang dipinjam dari bank.
2. Pembayaran bunga kepada kreditur.
3. Pembayaran utang kepada kreditur, termasuk utang yang sudah diperpanjang.

Dalam PSAK nomor 45 aktivitas pendanaan memiliki tambahan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas dari penyumbang atau pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang.
2. Penerimaan kas dari penyumbang atau pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan atas aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
3. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.

3. Aktivitas Investasi

Kegiatan yang termasuk dalam arus kas aktivitas investasi adalah perolehan (membeli) dan pelepasan (menjual) aktiva jangka panjang baik yang berwujud (seperti tanah, bangunan, peralatan), maupun yang tidak berwujud, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas (seperti menerima dan menagih pinjaman, surat berharga).

Contoh arus kas masuk dari kegiatan investasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan tidak berwujud lainnya.
2. Penerimaan kas dari sumbangan kolekte untuk pembangunan gedung gereja.

Contoh arus kas keluar dari kegiatan investasi adalah sebagai berikut:

1. Pembelian aktiva tetap (seperti alat-alat musik gereja) dan aktiva produktif lainnya.
2. Pembelian mobil gereja.
3. Pembangunan gedung gereja dari pinjaman bank.

Berikut salah satu contoh Laporan Arus Kas berdasarkan PSAK nomor 45, Metode Langsung:

Tabel 2.3

ENTITAS NIRLABA	
Laporan Arus Kas	
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X2	
(dalam Rp juta)	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari pendapatan jasa	13.050
Kas dari pemberi sumber daya	20.075
Kas dari piutang lain-lain	6.537
Bunga dan dividen yang diterima	21.425
Penerimaan lain-lain	375
Bunga yang dibayarkan	(955)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	(59.520)
Utang lain-lain yang dilunasi	(1.063)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	<i>(75)</i>
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	625
Pembelian peralatan	3.750
Penerimaan dari penjualan investasi	190.250
Pembelian investasi	187.250
<i>Kas yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	<i>(125)</i>
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	
Investasi dalam endowment	500
Investasi dalam endowment berjangka	175
Investasi dalam bangunan	3.075
Investasi perjanjian tahunan	500
	4.200
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	750
Pembayaran kewajiban tahunan	(363)
Pembayaran utang wesel	(2.850)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(2.500)
	(4.962)
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan</i>	<i>(762)</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(962)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.150
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	187

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011.

2.4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

2.4.4.1 Pengertian dan Tujuan

Catatan atas laporan keuangan adalah

“Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir untuk memberikan penjelasan informasi kepada pembaca laporan keuangan dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan”.³⁴

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan tambahan mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

2.4.4.2 Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut ini disajikan contoh catatan atas laporan keuangan organisasi nirlaba atau gereja berdasarkan PSAK nomor 45:

Catatan A

Organisasi menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aktiva lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi,

³⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuangan.

aset neto terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Organisasi menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

Catatan B

Aset neto terikat temporer untuk periode-peirode keuangan adalah sebagai berikut:

Aktivitas program A:

Pembelian peralatan	Rp 7.650
Penelitian	10.640
Seminar dan publikasi	3.800

Aktivitas program B:

Perbaikan kerusakan peralatan	5.600
-------------------------------	-------

Aktivitas program C:

Umum	7.420
Bangunan dan peralatan	5.375
Perjanjian perwalian tahunan	<u>7.125</u>
Untuk periode setelah 31 Desember 19X1	Rp 60.855

Catatan C

Aset neto terikat permanen dibatasi untuk:

Investasi tahunan, penghasilannya

dibelanjakan untuk mendukung:

Aktivitas Program A	Rp 68.810
Aktivitas Program B	34.155
Aktivitas Program C	34.155
Kegiatan lain entitas	<u>204.930</u>

Rp 342.050

Dana yang penghasilannya untuk ditambahkan

Pada jumlah sumbangan awal hingga

Mencapai nilai

2.500

Rp 5.300

Polis asuransi kematian yang penerimaan

ganti rugi asuransi atas kematian pihak yang

diasuransikan tersedia untuk mendanai

aktivitas umum

Rp 200

Tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi

Rp 7.500

Rp 355.050

Catatan D

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali melalui terjadinya beban tertentu atau terjadinya beban tertentu atau terjadinya kondisi yang diisyaratkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Tujuan pembatasan yang dicapai:

Beban program A	Rp 14.500
Beban program B	11.500
Beban program C	<u>3.975</u>

Rp 29.975

Peralatan untuk program A yang dibeli dan dimanfaatkan

3.750

pembatasan waktu yang telah terpenuhi:

Jangka waktu yang telah terpenuhi	Rp 2.125
Kematian pemberi sumber daya tahunan	1.000
	<u>Rp 3.124</u>
	Rp 36.850

Catatan F

Beban-beban yang terjadi adalah:

	Program			Manajemen & Umum	Pencarian Dana	Total
	A	B	C			
Gaji, Upah	18.500,0	9.750	4.312,5	2.825,0	2.400,0	Rp 37.787,5
Biaya lain-lain	5.187,5	1.875,0	4.312,5			11.875,0
Supplies dan perjalanan	2.162,5	2.500,0	1.225,0	600,0	1.400,0	7.887,5
Biaya jasa dan Profesional	400,0	3.725,0	1.500,0	500,0	975,0	7.100
Kantor dan Pekerjaan	2.900,0	1.500,0	1.125,0	545,0	250,0	6.320,0
Depresiasi	3.600,0	2.000,0	1.425,0	625,0	350,0	8.000,0
Bunga				955,0		955,0
Jumlah Beban	32.750,0	21.350,0	14.400,0	6.050,0	5.375,0	79.925,0

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Revisi 2011.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terhadap organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Yaitu:

Barbara Amelia Kristy (2017) melakukan penelitian mengenai “Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45”. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Bina Bhakti belum menerapkan

PSAK Nomor 45 baik dari segi format dan penyusunannya. Laporan keuangan Yayasan Bina Bhakti hanya berupa laporan keuangan bulanan yang terdiri dari laporan pendapatan dan pengeluaran saja.

Himawan Praptomo (2015) melakukan penelitian mengenai “Rekonstruksi Laporan Keuangan Gereja Kristen Jawi Weta Gresik Berdasarkan PSAK No.45”. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang disajikan oleh Gereja Kristen Jawi Weta Gresik belum menerapkan PSAK Nomor 45 baik dari segi format maupun penyusunannya. Laporan keuangan Gereja Kristen Jawi Weta Gresik disusun berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh Majelis Agung berformat AB, terdiri dari: Laporan harian yang dicatat dalam buku kas, yang kemudian direkap dan disusun menjadi Laporan Mingguan, direkap dan disusun lagi menjadi Laporan bulanan serta Laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut hanya berisi pendapatan dan pengeluaran saja.

Tantri Sofyana Putri (2014), melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Gereja Huria Kristen Batak (HKBP) Kertanegara Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang disajikan oleh Gereja Huria Kristen Batak (HKBP) Kertanegara Semarang belum menerapkan PSAK Nomor 45, gereja menyusun laporan keuangannya berdasarkan Tata Dasar dan Peraturan Gereja.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tantri Sofyana Putri. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai analisis penerapan PSAK Nomor 45, yang diterapkan pada organisasi nirlaba dengan kategori tempat peribadatan.

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian Tantri Sofyana Putri berfokus pada Gereja Huria Kristen Batak (HKBP) Kertanegara Semarang untuk laporan keuangan tahun 2013. Sedangkan penulis berfokus pada Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger Distrik III Kota Gunungsitoli untuk laporan keuangan tahun 2016.

Tabel 2.4

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Barbara Amelia Kristy	Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45	Laporan Keuangan Yayasan Bina Bhakti, adalah hanya berupa laporan pendapatan dan pengeluaran yayasan yang disajikan setiap bulannya. Tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45.
Himawan Prptomomo	Rekonstruksi Laporan Keuangan Gereja Kristen Jawi Weta Gresik Berdasarkan PSAK No.45	Laporan keuangan Gereja Kristen Jawi Wetan Gresik, adalah hanya berupa laporan keuangan pendapatan dan pengeluaran saja. Yang berpedoman pada kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Majelis Daerah dan Majelis Agung. Tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45.
Tantri Sofyana Putri	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Gereja Huria Kristen Batak (HKBP) Kertanegara Semarang	Laporan keuangan Gereja Huria Kristen Batak (HKBP) Kertanegara Semarang menyusun laporan keuangannya berdasarkan Tata Dasar dan Peraturan Gereja. Tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini mengacu pada format atau bentuk laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger Distrik III Kota Gunungsitoli tahun 2016 untuk menyesuaikan laporan keuangan Gereja dengan PSAK nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger Distrik III Kota Gunungsitoli yang terletak di Jalan Diponegoro No. 260 A Kelurahan Ilir, Gunungsitoli-Nias.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi data yang digunakan oleh penulis tidak hanya data yang bersifat kualitatif tetapi juga data yang bersifat kuantitatif.

Menurut Burhan Bungin, menyatakan bahwa:

“data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek”.³⁵

³⁵ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi**, Edisi Kedua: Pranamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 124.

Menurut Lofland dalam buku Lexy J. Moleong:

“data kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.³⁶

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder.

Menurut Burhan bungin data sekunder adalah: **“Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder”.**³⁷

Menurut Jadongan Sijabat, data sekunder adalah:

“Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi”.³⁸

Data sekunder yang penulis peroleh dari gereja adalah dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan, jenis data sekunder ini antara lain yaitu:

1. Data yang bersifat kualitatif. Berupa sejarah Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I), struktur organisasi gereja, *job description* masing-masing jabatan dalam organisasi, dasar kebijakan dan penyusunan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan gereja.

³⁶ Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Cetakan Ketigapuluhdua: Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2014, hal. 157.

³⁷ **Ibid**, hal. 128.

³⁸ Jadongan Sijabat, **Modul Metodologi Penelitian Akuntansi**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2014, hal. 82.

2. Data yang bersifat kuantitatif. Berupa laporan keuangan tahun 2016 Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger, catatan-catatan yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode:

- a. Teknik Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (*personal interview*) dengan melakukan komunikasi atau pembicaraan dua (2) arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan dalam hal ini bendahara Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia Jemaat Denninger, bagian tata usaha gereja. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur.

- b. Dokumentasi, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari, dan mencatat data-data dari dokumen, laporan keuangan tahun 2016 yang terdapat di Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia Jemaat Denninger.

- c. Studi Pustaka, Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan laporan keuangan gereja.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang diperoleh dari Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia Jemaat Denninger. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif

Menurut Mohammad Nazir, metode deskriptif adalah:

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.³⁹

Menurut Whitney, dalam buku Moh. Nazir metode deskriptif adalah **“pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”.**⁴⁰

Metode ini dilakukan dengan cara menentukan, mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasikan data laporan keuangan gereja

³⁹ Mohammad Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 43.

⁴⁰ **Ibid**, 2014, hal. 43.

tahun 2016 yang dibutuhkan, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang jelas tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan gereja pada Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia Jemaat Denninger.

b. Metode Komparatif

Menurut Aswarni Sudjud dalam buku Suharsimi Arikunto, metode komparatif adalah: **“metode yang dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja”**.⁴¹

Membuat perbandingan atas fakta-fakta yang ada di gereja (laporan keuangan gereja tahun 2016) dengan teori yang mendukung dan telah dipelajari (PSAK nomor 45). Dari hasil perbandingan tersebut maka akan diambil suatu kesimpulan untuk menyusun laporan keuangan Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia (GNKP-I) Jemaat Denninger yang mengacu pada PSAK nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Cetakan Keempatbela: Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 310.

